

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT**  
**(Dalam Pasal 968 KUH Perdata)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**RR. SITI SHOVIYAH CHOLIL**  
**2102088**

**JURUSAN AHWAL AL SYAHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**  
**2009**

H. Abdul Ghofur, M.Ag  
Perumahan Kaliwungu Indah  
Kaliwungu Kendal

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp	: 5 (lima) eksemplar	Kepada Yth.
Hal	: Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
	<u>a.n. Sdri. Rr. Sitti Shoviyah Cholil</u>	IAIN Walisongo
		Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rr. Sitti Shoviyah Cholil

NIM : 2102088

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH  
WASIAT (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juni 2009

Pembimbing I

**H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
**NIP. 150 279 723**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Rr. Sitti Shoviyah Cholil

NIM : 2102088

Jurusan : Ahwal Syahsiyah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT**  
**(Dalam Pasal 968 KUH Perdata)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

**30 Juni 2009**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, Juli 2009

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
NIP. 150 231 628

H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 150 279 723

**Penguji I,**

**Penguji II,**

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum  
NIP. 150 279 720

Johan Arifin, S.Ag, M.M  
NIP. 150 321 617

**Pembimbing I**

H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 150 279 723

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى  
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf , kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 180 – 181).\*

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara. 1993, hlm. 44

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tersayang (**Abi K.H. Drs. R.A.M. Sholichun Cholil dan Ummi Hj. Sri Djuwarijah**) memberi semangat, ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Kakak-kakakku tercinta (Kak Avin, Kak Titik, Mas Zein dan Mas Haekal)** serta **keponakan-keponakanku (Wiki, Kaela, Lani, dan Naura)** yang kusayangi yang selalu memheri motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Special thanks @yu', yang imut terima kasih atas semua curahan kasih sayangmu untukku, kau selalu ada buatku.
- **Teman-Temanku jurusan AS, Angkatan 2002 Fak. Syariah juga (Ayu, Mas Abib, Iffah, Ana, Uinroh, Mamet, Hani, Kakaa dan yang tak kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.**
- **Teman-teman kost (Olin, Toti, Kolidah, Najmi, Anis)**

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2009

**RR. SITI SHOVIYAH CHOLIL**  
**NIM. 2102088**

## ABSTRAK

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Yang menjadi masalah adalah bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968? Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis dan historis. Data Primer yaitu KUH- Perdata. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diijinkan baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Jika dianalisis Pasal 968 KUH Perdata maka ketentuan Pasal tersebut tampaknya bisa menimbulkan dampak dalam perspektif hukum Islam bahwa wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada adalah tidak dibolehkan atau tidak sah, dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas. Dalam ketentuan Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah wasiat bahwa hibah wasiat tidak dapat dicabut kembali, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Apabila ketentuan pasal 992 KUH Perdata dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama dan bila dihubungkan dengan Kompilasi hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah wasiat tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibah wasiat, Menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah wasiat hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan (masalah penarikan kembali hibah wasiat) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah wasiat. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah wasiat sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah wasiat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Taufik dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap kepada Nabi agung Muhammad Saw, serta sahabat dan keluarga Nya.

Setelah sekian banyak rintangan dan hambatan-hambatan yang penulis jumpai, namun Alhamdulillah dengan hidayah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)"**. Untuk mengantar penulis sebagai standard dalam memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud dihadapan pembaca sekalian tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak dan pada kesempatan ini dengan perasaan tulus penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan nya dan semua nasehat, bimbingan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Pernyataan terimakasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing, yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan juga pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. segenap dosen di lingkungan fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini



4. Bapak pimpinan dan karyawan perpustakaan Institut dan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memperkenankan penulis meminjam buku-buku sebagai bahan literatur dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orangtuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan karya sederhana ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis kendatipun penulis selalu memohon semoga skripsi ini dapat mengantarkan sampai kepada tujuan dan senantiasa ada guna, manfaat, dan faidahnya, Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMA MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	3
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT</b>	
A. Pengertian Hibah Wasiat dan Landasan Yuridisnya .....	13
B. Syarat dan Rukun Hibah Wasiat .....	22
C. Pencabutan Kembali/Batalnya Hibah Wasiat .....	38
<b>BAB III : HIBAH WASIAT DALAM KUH PERDATA</b>	
A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	46
B. Kedudukan Hibah Wasiat dalam KUH Perdata .....	50
C. Gugurnya Hibah Wasiat Pasal 992 KUH Perdata.....	58

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PASAL 968 KUH  
PERDATA**

A. Analisis tentang Pasal 968 KUH Perdata.....	61
B. Analisis Hukum Islam tentang Pasal 968 KUH Perdata.....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran - saran .....	80
C. Penutup .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang "asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan.<sup>1</sup>

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima perbuatan hukum berupa hibah yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi suatu perbuatan hukum yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>1</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 83.

hak kaum kerabat perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 180 – 181 yang berbunyi:

{180}

{181}

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>2</sup>

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, para ahli memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.<sup>4</sup> Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian pula ulama penganut mazhab Maliki menerangkan, wasiat yaitu suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 44.

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

<sup>4</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.

104.

<sup>5</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

Berdasarkan rumusan tersebut, Ibnu Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada empat, yaitu pemberi wasiat (*al-musi*), penerima wasiat (*al-musalahu*), barang yang diwasiatkan (*al-musa bihi*), dan *sighat* (ada *lafaz*).<sup>6</sup> Demikian pula menurut Muhammd Jawad Mughniyah, rukun wasiat ada empat yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata?
2. Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hibah wasiat dalam 968 KUH Perdata.

---

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.

<sup>7</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

2. Untuk mengetahui hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan beberapa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Muh. Zen (NIM: 2191073) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm Tentang Penarikan Wasiat*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, pemberi wasiat (*al-musi*) boleh menarik kembali *wishayah*-nya. Demikian pula *washi* boleh menolak atau membatalkannya, dengan catatan, ia harus memberi tahu hal itu kepada pemberi wasiat Sebab, sebagaimana yang telah disepakati, sesungguhnya hukum *wishayah* dalam keadaan seperti ini adalah *jaiz*. Namun dalam hal si pemberi wasiat tidak diberi tahu oleh *washi* atas penolakan atau pembatalan *wishayah*-nya terdapat perbedaan pendapat.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Taufik Rosadi (NIM: 2101261) berjudul: *Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi tentang Wasiat Wajibah*. *Washiyat wajibah* ini harus memenuhi dua syarat: pertama: yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggal dengan meninggalkan: ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dan anak laki-laki, dua anak laki-laki dan anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak

dari anak laki-laki, karena mereka menerima seperenam harta. Andaikata tidak ada dua anak laki-laki dari anak laki-laki, tentulah dua anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya *washiyat wajibah* dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masingnya menerima seperenam dari harta peninggalan.

Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah *washiyat wajibah*, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah pusaka yang ada padanya *washiyat ikhtariyah*, ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepada persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalam batas sepertiga harta dan tak ada pula *washiyat wajibah*, baik *washiyat ikhtariyah* itu sejumlah yang tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yaitu seperti seperempat, dan tidak pula dikadarkan dengan bagian salah seorang waris, maka wasiat itu diambil dari harta peninggalan setelah menyelesaikan hutang-hutang, jika ada.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Tri Wahyu Hidayati (NIM: 2199141) dengan judul: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Cara Pemecahan Wasiat Wajibah dan Kaitannya dengan Pasal 185 KHI*. Menurut Sayyid Sabiq, cara pemecahan masalah-masalah yang menyangkut *wasiat wajibah* ini sebagai berikut:

1. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dan kedua orang



tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap sebagai masih hidup, dan bagiannya sama seperti halnya kalau ia masih hidup.

2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh *wasiat wajibah* tersebut, bila *wasiat wajibah* tersebut sama dengan sepertiga dari harta peninggalan atau lebih kecil dari itu. Andainya lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan perimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.
3. Setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi *wasiat wajibah* tersebut) dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Ketentuan yang hampir serupa dengan *wasiat wajibah* ditemukan pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan, yang mana kemudian Kompilasi Hukum Islam ini telah pula diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 untuk disebarluaskan, dan selanjutnya Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana disebutkan di atas (untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam itu).

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tersebut (mengenai hukum kewarisan), khususnya dalam Bab III pasal 185 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1);

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat (2);

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, apabila si ahli waris tersebut mempunyai anak, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, dan bagian yang diterima anak-anaknya tersebut adalah sebesar bagian yang mestinya diterima oleh si ahli waris tersebut andainya ia masih hidup.

Penggantian tempat ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 tidak berlaku andainya terhadap mereka-mereka terkena ketentuan dalam pasal 173, yang mana dalam pasal 173 ditentukan bahwa : seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

*Keempat*, Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>8</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab,

---

<sup>8</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

*Kelima*, dalam Kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan:

9

Artinya: "Wasiat menurut arti bahasa adalah "menyampaikan yang memiliki makna menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat adalah menyampaikan karena pewasiat menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhiratnya".

*Keenam*, dalam kitab *Kifâyah Al Akhyâr* dirumuskan:

:

10

Artinya: "Perkataan wasiat diambil dari maksud ke kata: Aku menyambung perkara. Karena, orang yang berwasiat itu menyambung apa yang menjadi miliknya semasa hidupnya, disambung dengan apa yang ada sesudah matinya."

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam

---

<sup>9</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 92.

<sup>10</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 31.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>11</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. kepustakaan yang dimaksud yaitu yang membahas persoalan hibah wasiat.

### 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu KUH Perdata
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas, di antaranya: *I'annah al-Talibin*; *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Fath al-Wahab*; *Bughyatul Musytarsidin*; *al-Muhazzab*; *Tasir Ibnu Kasir*; *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir at-Tabari*; *Tafsir al-Manar*; *Tafsir Ahkam*; *Kitab Mazahib al-Arba'ah*; *Fath al-*

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>12</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

*Qarib; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in; Subulus Salam; Nail al-Autar.*

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam

### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **a. Metode Deskriptif Analitis**

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>13</sup> Dalam hal ini hendak diuraikan Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam.

#### **b. Historis**

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha

---

<sup>13</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.<sup>14</sup> Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.<sup>15</sup> Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang socio-kultural Pasal 968 KUH Perdata.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penelitian. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

---

<sup>14</sup>Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

<sup>15</sup>Mardalis, *op.cit.*, hlm. 25.

Bab kedua berisi tinjauan hukum islam tentang hibah wasiat yang meliputi pengertian hibah wasiat dan landasan yuridisnya, syarat dan rukun hibah wasiat, kegunaan hibah wasiat, batalnya hibah wasiat.

Bab ketiga berisi hibah wasiat dalam KUH Perdata yang meliputi sekilas tentang kitab undang-undang hukum perdata, kedudukan hibah wasiat dalam KUH Perdata, cara hibah wasiat, gugurnya hibah wasiat.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 968 KUH Perdata yang meliputi analisis terhadap Pasal 968 KUH Perdata dan analisis hukum Islam terhadap Pasal 968 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT

#### A. Pengertian Hibah Wasiat dan Landasan Yuridisnya

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).<sup>1</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>2</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian.<sup>3</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup>

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,<sup>5</sup> merumuskan hibah adalah:

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

<sup>4</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82



Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>6</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

/

7 .

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharap imbalan."

---

<sup>6</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 209

4. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>8</sup> hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,<sup>9</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,<sup>10</sup> bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>11</sup> Para ulama fiqh

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

<sup>9</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

<sup>10</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 84

<sup>11</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

(Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

( 4 : )

Artinya: ...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya<sup>12</sup>

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

: )

(177

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...<sup>13</sup>

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

<sup>14</sup>( )

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*", dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang

---

<sup>12</sup>Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>14</sup>Al-San'any, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.<sup>15</sup>

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>16</sup> Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,<sup>17</sup> bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

<sup>17</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

Adapun kata "wasiat" bahwa dalam *Kamus Arab Indonesia*, wasiat (وصية) yang bentuk *jama'*-nya وصاي artinya pesan-pesan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, wasiat berarti pesan (الوصية).<sup>19</sup> Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, wasiat berarti pesan yang terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal (berkenaan dengan harta benda dsb); surat – surat warisan.<sup>20</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).<sup>21</sup> Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, wasiat berarti kehendak yang penghabisan dari pada orang yang akan mati.<sup>22</sup>

Dalam *Fath al-Mu'în* disebutkan:

---

<sup>18</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 500.

<sup>19</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1563.

<sup>20</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 1149.

<sup>21</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1270.

<sup>22</sup>Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 1084.

<sup>23</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 92.

Artinya: "Wasiat menurut arti bahasa adalah "menyampaikan yang memiliki makna menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat adalah menyampaikan karena pewasiat menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhiratnya".

Dalam kitab *Kifâyah Al Akhyâr* dirumuskan:

:

24

Artinya: "Perkataan wasiat diambil dari maksud ke kata: Aku menyambung perkara. Karena, orang yang berwasiat itu menyambung apa yang menjadi miliknya semasa hidupnya, disambung dengan apa yang ada sesudah matinya."

Pengertian wasiat menurut terminologi syari'at dapat disebutkan sebagai berikut: menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>25</sup>

26

Artinya; "Menurut syara' adalah secara suka rela memberikan hak yang dikaitkan dengan setelah mati".

27

---

<sup>24</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 31.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 336.

<sup>26</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *loc.cit.*,

<sup>27</sup>Imam Taqi al-Din, *loc.cit.*,

Artinya: "Dalam istilah syara', wasiat itu adalah penyerahan kuasa bertindak yang khusus sesudah mati. Dalam permulaan Islam, wasiat itu wajib dengan menyerahkan seluruh harta kepada para famili".

Ulama mazhab Hanafi menerangkan, wasiat ialah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma.<sup>28</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 - 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.

Wasiat itu disyari'atkan melalui Kitab, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitab, Allah Swt. berfirman:

(180 : )

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib

---

<sup>28</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 180).<sup>29</sup>

(11 : )

Artinya: "... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ..." (QS. an-Nisa: 11).<sup>30</sup>

Dan firman-Nya:

(106 : )...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua (yang yang adil di antara kamu ...." (QS. al-Maidah: 106).<sup>31</sup>

Di dalam Sunnah juga terdapat hadis-hadis berikut:

<sup>32</sup>( )

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ma'ruf dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang

---

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 44.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>32</sup> Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.



muslim yang memiliki sesuatu yang pantas diwasiatkannya sampai menginap tiga malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Abdullah Ibnu 'Umar berkata: sejak aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda begitu tidak satu malam pun kulalui tanpa wasiat di sisiku". (HR. Muslim).

Makna hadis di atas, bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

## B. Syarat dan Rukun Hibah Wasiat

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah wasiat maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>33</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>34</sup> Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>35</sup> melazimkan sesuatu.<sup>36</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>37</sup> Hal ini sebagaimana

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>35</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>36</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

<sup>37</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,<sup>38</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>39</sup>

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>40</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,<sup>41</sup> rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan

---

<sup>38</sup> Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

<sup>40</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

<sup>41</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>42</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah wasiat mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>43</sup> rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî,<sup>44</sup> bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) *Aqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>45</sup> Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.<sup>46</sup>

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 1692.

<sup>43</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

<sup>44</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

<sup>47</sup>Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:<sup>48</sup>

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah,

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 245 – 247.

karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.<sup>49</sup>

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.<sup>50</sup>
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat

---

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 245

<sup>50</sup>Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 76

ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

*Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:<sup>51</sup>
  - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
  - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau

---

<sup>51</sup>Zakiah Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.<sup>52</sup>

Dalam konteksnya dengan wasiat, bahwa para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>53</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniah mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu hibah harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al musî*), orang yang menerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al musa-bî*) dan redaksi wasiat (*shighat*).<sup>54</sup> Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.

Adapun syarat-syarat sahnya wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Orang yang Berwasiat

Menurut Ibnu Rusyd bahwa *fuqaha* sepakat, pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu

---

<sup>52</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 246.

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 339.

<sup>54</sup>Muhammad Jawad Mughniah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan mazhab Imamiyah menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaikan (*al birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah

---

<sup>55</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.



lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.<sup>56</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang *idiot*, orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.<sup>57</sup>

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan di kalangan mazhab Imamiyah orang *idiot* tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru dan dipaksa melakukan wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa

---

<sup>56</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 506.

<sup>57</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 340.

adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fikih tradisional.

## 2. Orang yang Menerima Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, *fuqaha* sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.<sup>58</sup> Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut Abburrahman Al-Jaziri, di kalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat (*mushaan lahu*) disyaratkan harus: (1) Ia mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki; (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih

---

<sup>58</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 250.

ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang dipukul itu berwasiat lalu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau gila maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya; (4) orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir *zimmi*, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh; (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir *zimmi* yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.<sup>59</sup>

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab Syi'ah Ja'fariah menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima

---

<sup>59</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni yang mengatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.<sup>60</sup> Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.<sup>61</sup> Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ini pun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

### 3. Barang yang Diwasiatkan

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para ahli hukum Islam di kalangan *Anshar* mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila,

---

<sup>60</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 452-454.

<sup>61</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 507.

Ibnu Syubrumah, dan para ahli hukum *Zhahiri* berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal, mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah tidak sama dengan harta. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewariskan manfaat saja hukumnya boleh.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan. Ahli hukum di kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga wasiat yang demikian itu tetap berlaku, tetapi jika lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu

---

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341.

ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja. Di kalangan mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut tidak masalah, sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, "misalnya seseorang mewariskan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harganya lima ribu maka yang lima ribu itu adalah nilai wasiat itu. Sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka."<sup>63</sup>

Dalam Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.<sup>64</sup> Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi

---

<sup>63</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 226

<sup>64</sup>Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 132.

wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya dalam Pasal 201 dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.<sup>65</sup>

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga bakal ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar misalnya si polan, sesuatu, sedikit,

---

<sup>65</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 162.

banyak, sebagian dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang ke luar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina, dan sebagainya.<sup>66</sup>

#### 4. Pelaksanaan Wasiat

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan "aku wasiatkan barang atau untuk si polan" maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan kabul sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada ijab kabul secara

---

<sup>66</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 507.



tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada kabul dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada di tempat, misalnya keadaan orang yang memberi wasiat itu perjalanan atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu secara tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut sah? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan ijab tanpa kabul, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notaris dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.<sup>67</sup>

### C. Pencabutan Kembali/Batalnya Hibah Wasiat

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

<sup>69</sup>( )

---

<sup>67</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 126.

<sup>68</sup>Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4, hlm. 127

<sup>69</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 320

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.

Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri,

maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.

- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>70</sup> Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit*, jilid 2, hlm. 334

:

<sup>71</sup>( )

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dalam hubungannya dengan wasiat bahwa para ulama sepakat bahwa wasiat bisa batal apabila:

1. Wasiat itu dicabut kembali atau dibatalkan sendiri oleh yang memberi wasiat tanpa memerlukan persetujuan pihak yang akan menerima wasiat. Pembatalan itu bisa berbentuk dijualnya harta yang menjadi obyek wasiat itu oleh yang berwasiat atau mengalihkan wasiat yang sudah disampaikan itu kepada pihak lain atau ia berwasiat menambah, mengurangi, atau menukar materi yang sudah diwasiatkannya tersebut.
2. Wasiat tersebut bisa pula batal bila pihak yang berwasiat terkena penyakit gila sampai ia meninggal dunia.
3. Wasiat bisa pula batal apabila pihak yang akan menerima wasiat lebih dahulu wafat dari orang yang berwasiat.
4. Wasiat juga bisa batal apabila harta yang diwasiatkan itu musnah atau hilang atau habis sebelum pihak yang berwasiat meninggal.
5. Wasiat bisa batal apabila pihak yang akan menerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat kepadanya secara tidak hak, atau berencana untuk

---

<sup>71</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6, hlm. 196

membunuh pihak yang berwasiat namun rencana itu tidak terlaksana akibat sesuatu hal di luar kemampuan pihak yang menerima wasiat.<sup>72</sup>

Bolehkah seseorang yang sakitnya membawa kematian untuk berwasiat?

Istilah yang dipakai oleh kitab-kitab fikih dalam menyebutkan seseorang yang sakit yang membawa kematiannya adalah *maradh al-mawat*, kendatipun yang tahu secara pasti apakah benar-benar sakit itu yang menyebabkan kematiannya hanyalah Allah semata. Yang pasti, maksud *maradh al-mawat* di sini adalah sakit seseorang yang berlanjut dengan kematiannya.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, *maradh al-mawat* ada dua bentuknya. *Pertama*, yang berkaitan dengan kondisi sakitnya yang diyakini sebagai penyebab ia wafat. Dalam keadaan seperti ini, yang dilihat ialah apakah ketika ia berwasiat itu masih layak (bisa melakukan perbuatan hukum) ia bertabarru' terhadap hartanya atau tidak. Bila keadaan sakitnya itu memungkinkan ia bertabarru', yakni masih cakap bertindak secara sempurna karena ingatan dan pikirannya masih sehat, wasiat yang dilakukannya adalah sah. Akan tetapi, bila kondisi sakitnya yang berat yang tidak layak lagi ia bertabarru', wasiat yang dilakukannya tidak sah. *Kedua*, keadaan sakitnya yang dikhawatirkan hal itu menyebabkan kematiannya. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaan si sakit baru dalam situasi "diduga" akan menyebabkan kematiannya. Hal ini berarti bahwa si sakit itu masih dalam kondisi yang

---

<sup>72</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 97-99.

cakap untuk bertabarru'. Pada keadaan yang demikian, si sakit itu boleh dan sah berwasiat, dan bahkan dianjurkan untuk berwasiat kalau ia memang berniat untuk menghibahkan sebagian hartanya.<sup>73</sup>

Sebelum menyudahi uraian ini, ada baiknya pula secara singkat diungkapkan beberapa hikmah dibolehkannya, bahkan dianjurkannya, berwasiat oleh agama. Dibolehkannya seseorang berwasiat oleh agama menunjukkan bahwa Islam amat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap harta yang dimilikinya. Islam masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bertindak terhadap harta miliknya, kendatipun diberikan pembatasan-pembatasan dalam kuantitasnya. Ini juga mengandung pengertian bahwa Islam menyukai seseorang untuk berbuat kebajikan melalui harta yang dia miliki, dan kebajikan itu masih boleh dilakukannya setelah ia wafat dengan jalan wasiat.

Berwasiat menghibahkan harta kepada orang lain setelah yang berwasiat wafat berarti melakukan amal-amal yang terpuji. Melalui wasiat, seseorang masih bisa memberikan bantuan kepada pihak lain, terlepas apakah bantuan tersebut diberikan karena motivasi agama atau karena alasan-alasan keduniaan semata-mata. Pihak-pihak tertentu yang memerlukan bantuan yang bersifat material atau sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan mendapat bagian harta melalui warisan, dapat diberikan pertolongan melalui wasiat, seperti memberikan harta melalui wasiat kepada anak angkat. Dalam hal ini, suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa wasiat yang diberikan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*,

tidaklah boleh merugikan atau menelantarkan keluarga dekat (ahli waris). Adanya batasan jumlah maksimal kebolehan berwasiat haruslah dilihat sebagai upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar mereka tidak terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat yang terlalu besar.<sup>74</sup>

Kompilasi mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197:<sup>75</sup>

- 1). Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,
  - c Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu
- 2). Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*,

<sup>75</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 458

- b mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3). Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut di analogkan kepada *mawani' al-irs* (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi terealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Dalam rumusan fiqh, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut:

- a Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
- c Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 342.



### **BAB III**

#### **HIBAH WASIAT DALAM KUH PERDATA**

##### **A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Subekti, perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>1</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang dimaksud hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan yang lain.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu, menurut Achmad Sanusi, bahwa hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).

---

<sup>1</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 9

<sup>2</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 1

<sup>3</sup>Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 115.

<sup>4</sup>LJ.van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 232

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yang berinduk pada Code Civil Prancis. Pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis pernah menjajah Belanda dan Code Civil diberlakukan pula di Belanda. Kemudian setelah Belanda Merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang hukum Perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Perancis.<sup>5</sup>

Sumber pokok Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838; akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.<sup>6</sup>

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990, hlm.

<sup>6</sup>CS.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 209. Lihat juga Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 66-71

sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon" dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

Hukum perdata diatur dalam (bersumber pokok pada) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat B.W.). KUHS itu terdiri atas 4 Buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
2. Buku II, yang berjudul Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;
3. Buku III, yang berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu,
4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Liwat Waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat

pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
  - a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum;
  - b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
  - a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri;
  - b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*);
  - c. perwalian (*voogdij*);
  - d. pengampunan (*curatele*).
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 16

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).<sup>8</sup>

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah<sup>9</sup>

## **B. Kedudukan Hibah Wasiat dalam KUH Perdata**

Menurut isinya, maka ada 2 jenis wasiat:<sup>10</sup>

- a). Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti disebut dalam pasal 964 wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dan harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.

- b). Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat.

Pasal 957 memberi keterangan seperti. berikut:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu

---

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29.

<sup>9</sup>CST Kansil, *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 16.

b) Barang-barang dari satu jenis tertentu

c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.<sup>11</sup>

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus. Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa jenis wasiat dibagi menurut bentuknya. Menurut pasal 931 ada 3 rupa wasiat menurut bentuk.

a) Wasiat olografis, atau wasiat yang ditulis sendiri.

b) Wasiat umum (openbaar testament)

c) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.<sup>12</sup>

Tentang wasiat olografis pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1). Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris,
- 2). harus disimpan kepada seorang notaris.

Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh:

- a). Yang membuat testament itu sendiri.
  - b). Notaris yang menyimpan wasiat itu
  - c). Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
- 3). Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi testament itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage, hlm. 118.

wasiataya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Kalau testament berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu. Soal kekuatan pembuktian ditentukan dalam pasal 933 sebagai berikut:<sup>13</sup>

Testament olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan testament umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangari ialah waktu, di mana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu membuatnya *testament* itu.

Kemudian tulisan dari testament itu, dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya. Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam testament itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.<sup>14</sup>

Di dalam hal testament olografis menurut pasal 934 penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali testament itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta.

---

<sup>13</sup> Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 122.

Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam testament harus dilaksanakan. Jika testament olografis di dalam keadaan tertutup maka tidak akan diketahui bagaimana isinya, sebab notaris dilarang membuka testament itu. Untuk itu testament harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai ini membuka testament. Hal ini harus dicatat dalam proses-verbal. yang harus memuat pula keadaan testament pada waktu disampaikan kepada Balai. Kemudian testament dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagai mana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam pasal 938 dan 939 sebagai berikut:

- 1). Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi,
- 2). Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- 3). Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya ketentuan itu. Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya.<sup>15</sup>

Ada pendapat yang bilang: harus lisan, dan alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
- b. Dulu testament umum itu disebut testament lisan.

---

<sup>15</sup> Prawirohamijoyo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984, hlm. 94.



- c. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris itu.

Lain pendapat bilang :

Bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu. dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat yang belakangan ini dianut oleh Wirjono Prodjodikoro S.H.

- 4). Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya.
- 5). Jika itu sudah betul, maka testament harus diberi tanda-tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.
- 6). Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir.
- 7). Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapannya telah dipenuhi.<sup>16</sup>

Orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa terhadap golongan mana hukum waris Barat ini tidak berlaku, menurut Stbl. 1924 —

---

<sup>16</sup> Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 19.

556 pasal 4, dimungkinkan membuat testament, tetapi hanya dengan bentuk testament umum saja.

Wasiat rahasia atau testament tertutup. Ini diatur dalam pasal 940 dan pasal 941. Caranya membuat testament semacam ini adalah sebagai berikut :

- 1). Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menanda tanganinya sendiri
- 2). Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
- 3). Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tanda tangan.
- 4). Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 saksi tadi.<sup>17</sup>

942. Kalau orang yang meninggalkan testament rahasia meninggal, maka notaris harus menyampaikan testament itu kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka testament. Dari penerimaan dan pembukaan testament, lagi pula tentang keadaan bagaimana testament terdapat pada waktu penerimaan, harus dibuat proses perbal. Kemudian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

testament harus dikembalikan pada notaris. Terhadap semua jenis testament terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

930. Testament tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk :

- a. menguntungkan satu sama lain
- b. kepentingan orang ketiga

Adapun rasio dari larangan ini ialah karena kepada seorang pembuat testament harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali testament, maka jika testament itu dibuat oleh dua orang penarikan kembali itu agak sukar dilakukan.

879. Suatu ketentuan dalam wasiat yang ber»si pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan (*fidei commis*) dilarang.

Dalam hal ini seorang mendapat sesuatu dari pewaris dengan ketentuan bahwa barang itu kemudian harus diberikan kepada orang ketiga. Adapun rasio dari pasal ini ialah supaya suatu barang jangan terlalu lama disimpan sehingga akan merugikan lalu lintas barang. Prinsip ini ada perkecualiannya yaitu apabila pemberian dalam suatu wasiat dilakukan kepada anaknya untuk semua anak-anak dari anak itu; kepada saudaranya untuk semua anak dan saudara itu.<sup>18</sup>

Ini semua diatur dalam pasal 973—991.

Kemudian adalah yang disebut *fidei commis de residuo* yang dimuat dalam pasal 881.

---

<sup>18</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000, hlm. 41.

Di dalam hal ini ditentukan bahwa seorang waris (legataris) mendapat keuntungan dari pewaris dengan syarat bahwa sisa dari barang yang diterima itu kemudian harus diberikan kepada anak-anaknya. Wasiat sebagai ini juga tidak dilarang.<sup>19</sup>

944. Saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a). Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b). Penduduk Indonesia
- c). Mengerti bahasa yang dipakai dalam testament 944.ayat 2 :

Orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah:<sup>20</sup>

- a. semua ahli waris dan legataris
- b. semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6.
- c. anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam b sampai derajat ke-6.
- d. pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testament.

Syarat-syarat tersebut dalam pasal 944 berlaku pada waktu syarat-syarat membuat testament saja, sehingga karena testament olografis dibuat dengan tulisannya pewaris sendiri dan testament rahasia itu di dalam keadaan tertutup, maka persyaratan itu hanya berlaku bagi testament umum saja.

Adapun rasio dari persyaratan itu pada pokoknya untuk menjaga agar supaya orang-orang yang jadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari pada testament itu yang mungkin akan mengurangi haknya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 106.

Suatu testament yang tiada memenuhi syarat, tidak berlaku sebagai testament. Mengenai ketentuan ini Wiryono Prodjodikoro S.H. mempunyai keberatannya, karena dianggap terlalu kaku.<sup>21</sup>

935 : Di dalam prinsip suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris.

Tapi ada wasiat yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, asal isinya mengenai :

- a) pengangkatan pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*)
- b) penyelenggaraan pengukuran
- c) menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu dan mebel yang tertentu.

Wasiat semacam ini disebut *codicil*.

### C. Gugurnya Hibah Wasiat Pasal 992 KUH Perdata

Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.<sup>22</sup>

Sebagaimana telah diterangkan, suatu testament dapat; ditarik kembali (*herroepen*) setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, sifatnya perjanjian perkawinan hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah

---

<sup>21</sup> Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 103.

atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan testament, menarik kembali suatu testament pun orang harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali suatu testament dapat dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzivistig*). Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya testament baru di mana diterangkan secara tegas bahwa testament yang dahulu ditarik kembali.<sup>23</sup>

Pencabutan dengan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya testament baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan testament yang lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu testament, tak dapat juga ditarik kembali.<sup>24</sup>

Sebagaimana ternyata di atas, maka pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara-cara tertentu, yang jika tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya testament itu. Jadi, lain daripada pembuatan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak terikat oleh suatu bentuk atau cara. Berhubung dengan itu, timbulah pertanyaan tentang apa saja yang perlu diletakkan dalam bentuk testament itu? Sebagai pedoman dapat dipakai : Segala perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*), yang baru akan berlaku atau mendapat kekuatan, bila si pembuat itu telah meninggal harus diletakkan dalam bentuk *testament*. Sifat yang pertama itulah yang dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua perikatan yang digantungkan pada matinya seorang harus diletakkan dalam suatu testament,

---

<sup>23</sup> Prawirohamijoyo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 123.

misalnya suatu perjanjian bahwa suatu hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, baru akan berakhir apabila si penyewa telah meninggal. Teranglah kiranya, perjanjian-perjanjian semacam ini, meskipun digantungkan pada matinya salah satu pihak, merupakan suatu perikatan yang seketika juga mengikat kedua belah pihak, perikatan mana tak dapat ditiadakan begitu saja oleh satu pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 106.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 968 KUH PERDATA**

#### **A. Analisis terhadap Pasal 968 KUH Perdata**

Dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak.

Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat.

Jika dianalisis Pasal 968 KUH Perdata maka ketentuan Pasal tersebut tampaknya bisa menimbulkan dampak. Dampak yang dimaksud yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Penerima hibah wasiat akan merasa kecewa jika dikemudian hari barang yang diharapkan ternyata tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi hibah wasiat menjadi berkurang, dan orang tidak akan tertarik lagi dengan apa yang namanya hibah wasiat karena tidak adanya kepastian tersebut.



Pasal 968 KUH Perdata secara implisit menganggap hibah wasiat terhadap barang yang belum ada, ini menunjukkan bahwa karena dalam sistem KUH Perdata, hibah wasiat itu boleh saja terhadap barang yang belum jelas dan tidak dapat dilihat oleh penerima hibah wasiat.

Apabila dianalisis bahwa jika barang yang hendak dihibahkan belum ada maka berarti barang tersebut tidak dapat dilihat, dan barang yang tidak dapat dilihat dapat dianggap sebagai angan-angan saja.

Dalam perspektif KUH Perdata bahwa hibah terhadap barang yang sudah ada atau belum ada tidak dipermasalahkan. KUH Perdata tidak menekankan keberadaan barang itu dapat dibuktikan saat itu juga dan boleh ditunda. Penundaan untuk menerima barang tersebut dianggap sebagai hibah wasiat.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 968 KUH Perdata**

Dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat hibah wasiat sehingga hibah wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun hibah wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>1</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu hibah

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 339.

wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al musi*), orang yang menerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al musa-bi*) dan redaksi wasiat (*shighat*).<sup>2</sup> Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.

Adapun syarat-syarat sahnya wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Orang yang Berwasiat

Menurut Ibnu Rusyd bahwa *fuqaha* sepakat, pemberi hibah wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa semua mazhab sepakat bahwa hibah wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan hibah wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah.

---

<sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

<sup>3</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.

Mereka berselisih pendapat tentang hibah wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan hibah wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa hibah wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika hibah wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan hibah wasiat. Di kalangan mazhab Imamiyah menganut prinsip bahwa hibah wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaikan (*al birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang *idiot*, orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, hibah wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.<sup>5</sup>

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan di kalangan mazhab Imamiyah orang *idiot* tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi

---

<sup>4</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 506.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 340.

jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam hibah wasiat, keliru dan dipaksa melakukan wasiat, maka hibah wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hibah wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fikih tradisional.

## 2. Orang yang Menerima Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, *fuqaha* sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima

wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.<sup>6</sup> Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut Abburrahman Al-Jaziri, di kalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat (*mushaan lahu*) disyaratkan harus: (1) Ia mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki; (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang dipukul itu berwasiat lalu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau gila maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak

---

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 250.

memperbolehkannya; (4) orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir *zimmi*, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh; (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir *zimmi* yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.<sup>7</sup>

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya hibah wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT. sudah menghapus hibah wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab Syi'ah Ja'fariah menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa hibah wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni yang mengatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.<sup>8</sup> Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa hibah wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi

---

<sup>7</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 452-454.

sepertiga harta warisannya.<sup>9</sup> Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ini pun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

### 3. Barang yang Diwasiatkan

Barang yang dihibah wasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang dihibah wasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya menghibah wasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para ahli hukum Islam di kalangan *Anshar* mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan para ahli hukum *Zhahiri* berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal, mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah tidak sama dengan harta. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau

---

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 507.

manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewariskan manfaat saja hukumnya boleh.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada adalah tidak dibolehkan atau tidak sah. dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Pasal 968 KUH Perdata tersebut mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat terhadap barang yang belum ada adalah dilarang. Dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.
2. Dalam ketentuan Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah wasiat bahwa hibah wasiat tidak dapat dicabut

kembali, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Apabila ketentuan pasal 992 KUH Perdata dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama dan bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam ada hubungan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah wasiat tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibah wasiat, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah wasiat hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah wasiat) sejalan dengan peran dan fungsi hibah wasiat. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah wasiat sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah wasiat.

## **B. Saran-Saran**

Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang hibah wasiat, maka hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan dalam rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Pasal 968 KUH Perdata tersebut mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat terhadap barang yang belum ada adalah dilarang. Dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.
2. Dalam ketentuan Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah wasiat bahwa hibah wasiat tidak dapat dicabut

kembali, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Apabila ketentuan pasal 992 KUH Perdata dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama dan bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam ada hubungan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah wasiat tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibah wasiat, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah wasiat hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah wasiat) sejalan dengan peran dan fungsi hibah wasiat. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah wasiat sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah wasiat.

## **B. Saran-Saran**

Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang hibah wasiat, maka hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan dalam rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Sitti Shoviyah Cholil

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 20 Pebruari 1984

Alamat Asal : Sucenjuritengah RT 04 RW 02 Bayan Purworejo

Pendidikan : - SDN 04 Kodya Manado Sulawesi Utara lulus th  
1996

- MTs Imam Puro Kutoarjo Purworejo lulus th 1999

- MAN Purworejo lulus th 2002

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rr. Sitti Shoviyah Cholil

## **BIODATA DIRI DAN ORANG TUA**

Nama : Rr. Sitti Shoviyah Cholil

NIM : 2102088

Alamat : Sucenjuritengah RT 04 RW 02 Bayan Purworejo

Nama orang tua : Bapak H. Drs. R.A.M. Sholichun Cholil dan Ibu Hj. Sri  
Djuwarijah

Alamat : Sucenjuritengah RT 04 RW 02 Bayan Purworejo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6.
- Aveldoorn, LJ.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Dahlan, Abdual Aziz, *et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2.
- Daradjat, Zakiah, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.

- Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III.
- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Kansil, CS.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kartohadiprodo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Kasani, Imam, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *'Ilm Usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.
- Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed,

"Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976.

Prawirohamijoyo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Granvenhage.

Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III.

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.

San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III.

Sanusi, Acmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988.